

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintahan di Indonesia mengalami perkembangan seiring dengan terjadinya berbagai perubahan, salah satunya adalah sistem pelestarian menjadi terdesentralisasi yang bertujuan untuk menciptakan otonomi daerah. Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pasal 1 ayat 6 menyatakan bahwa otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengelola pemerintahan pusat maupun daerah serta kepentingan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, Pasal 3 Ayat 1 menyatakan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan dengan tertib, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta harus efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan akuntabel. Selain itu, pengelolaan tersebut juga harus memperhatikan prinsip keadilan, kepatuhan, dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Untuk mencapai transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah, pemerintah daerah wajib menyajikan laporan keuangan yang berkualitas.

Laporan keuangan yang disusun oleh pemerintah harus memenuhi prinsip ketepatan waktu dan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintah yang berlaku. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, informasi yang disajikan dalam laporan keuangan

bertujuan untuk memenuhi kebutuhan informasi dari seluruh kelompok pengguna. Oleh karena itu, laporan keuangan pemerintah tidak dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik dari setiap kelompok pengguna. Namun, mengingat peran laporan keuangan pemerintah sebagai bentuk akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara, komponen yang disajikan setidaknya harus mencakup jenis laporan dan elemen informasi yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. (BPK, 2010)

Dalam konteks pemerintahan daerah, kualitas laporan keuangan merupakan salah satu indikator utama untuk menilai kinerja pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah tidak hanya mencerminkan kondisi keuangan, tetapi juga berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Oleh karena itu, peningkatan kualitas laporan keuangan harus menjadi prioritas bagi pemerintah daerah, terutama di Kota Tasikmalaya. (Agustiningtyas et al., 2020)

Kualitas laporan keuangan daerah wajib ketentuan yang ditetapkan dalam standar yang ada, dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan. Hal ini bertujuan agar informasi yang disajikan dalam laporan tersebut dapat dipahami dan memenuhi kebutuhan pengguna dalam pengambilan keputusan yang lebih baik. Kualitas informasi dalam laporan keuangan pemerintah daerah dapat digunakan oleh pemangku kepentingan sebagai dasar untuk membuat keputusan terkait kondisi keuangan entitas pemerintah daerah (Yanti & Made, 2020). Oleh karena itu, laporan keuangan yang berkualitas sangat diperlukan dalam proses

pelaporan keuangan yang baik sesuai dengan peraturan yang berlaku (Firmansyah et al., 2022).

Laporan keuangan pemerintah daerah berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD yang harus disusun secara menyeluruh dan tentunya harus melalui pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Setiap tahun, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) akan diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan akan mendapatkan penilaian berupa opini dari Badan Pengawasan Keuangan. Apabila BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap LKPD, maka laporan keuangan yang disajikan oleh entitas pemerintah tersebut dapat dianggap wajar dan berkualitas. BPK RI memberikan beberapa jenis opini atas pemeriksaan laporan keuangan pemerintah, yaitu Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Opini Tidak Wajar (TW), dan Opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) (BPK RI, 2022).

Namun, dalam praktiknya masih banyak pemerintah daerah yang menghadapi berbagai permasalahan dalam penyusunan laporan keuangan. Permasalahan tersebut antara lain kurangnya kualitas sumber daya manusia dalam pengelolaan keuangan, lemahnya penerapan prinsip good governance, serta belum optimalnya implementasi sistem pengendalian internal. Permasalahan-permasalahan ini dapat memengaruhi kualitas laporan keuangan yang disajikan, sehingga berdampak pada opini yang diberikan oleh BPK dan mengurangi kepercayaan publik terhadap akuntabilitas pemerintah daerah (BPK RI, 2022)

Dalam menciptakan laporan keuangan yang baik, salah satu komponen pentingnya adalah *Good Governance*. Bentuk penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel adalah dengan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hal ini merupakan bentuk apresiasi pemerintah terhadap terciptanya tata kelola keuangan negara yang baik. Pencapaian opini WTP menjadi indikator bahwa pemerintah telah berhasil menerapkan tata kelola yang baik, terutama dalam hal akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), khususnya dalam pertanggungjawaban negara. Meskipun laporan dari pemerintah pusat dan daerah telah disusun secara wajar dan memadai sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), hal ini tidak menjamin bahwa tidak ada pelanggaran atau kebijakan anggaran. Predikat WTP hanya berfungsi sebagai acuan untuk menilai kepatuhan dan kewajaran berdasarkan peraturan yang berlaku (Mentari, 2022).

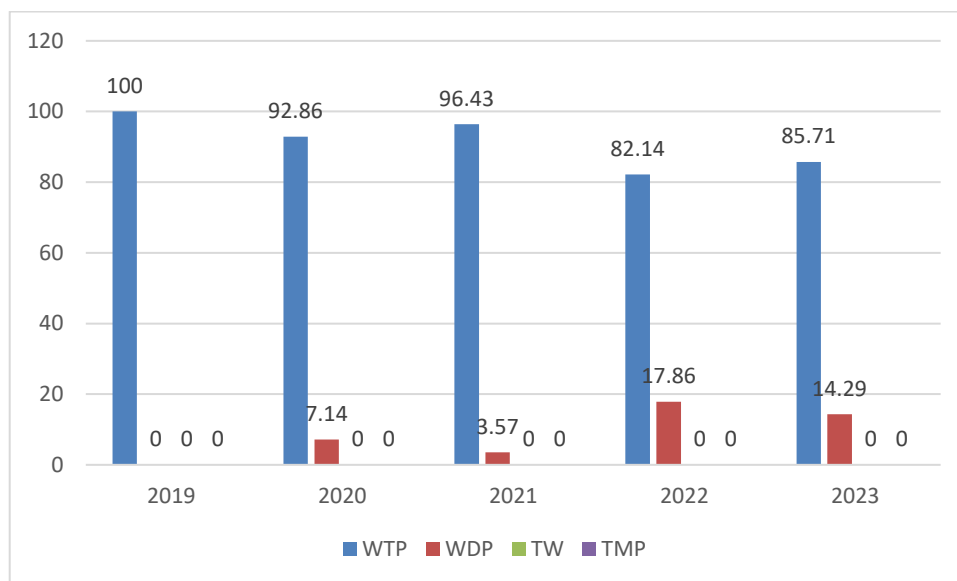
Keterbukaan dalam laporan keuangan merupakan aspek krusial dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Oleh karena itu, baik pemerintah pusat maupun daerah perlu memperkuat sistem yang ada untuk mencegah praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme di lingkungan pemerintahan.

Dalam upaya menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, sangat penting untuk memiliki sistem pengendalian internal pemerintah yang terpercaya. Sistem ini berperan sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2008 mengatur sistem pengendalian internal pemerintah, yang didefinisikan dalam pasal 1 ayat 2 sebagai proses

integral dari tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berkesinambungan oleh pimpinan dan seluruh pegawai. Proses ini bertujuan untuk memberikan kepastian dan keyakinan yang wajar atas pencapaian tujuan organisasi melalui kegiatan yang dilakukan secara efektif dan efisien, serta mematuhi peraturan perundang-undangan untuk mencapai tata kelola yang baik.

Kualitas laporan keuangan yang rendah dapat disebabkan oleh sistem pengendalian internal yang belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan dalam penerapan sistem pengendalian internal untuk penyusunan laporan keuangan daerah. Dalam hasil pemeriksaan, BPK masih menemukan sejumlah masalah terkait kelemahan sistem pengendalian internal dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan Hal ini tercermin dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS). Meskipun tidak berpengaruh signifikan terhadap kewajaran penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2021, pemerintah tetap harus mematuhi temuan dan rekomendasi BPK demi perbaikan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) (BPK RI, 2022).

Kelemahan dalam sistem pengendalian internal di pemerintah daerah sering kali muncul, yang dapat berdampak negatif pada kinerja pemerintah daerah. Hal ini berpotensi menyebabkan kekurangan, sehingga kualitas laporan keuangan pemerintah daerah menjadi tidak memadai. Dibawah ini merupakan grafik dari perkembangan opini BPK RI pada tahun 2019 – 2023:



Sumber: bpk.go.id/IHPS 1 2023

Gambar 1.1

Opini BPK Terhadap LKPD 2019-2023

5 tahun terakhir (2019 – 2023), opini LKPD mengalami perbaikan serta penurunan. Selama periode tersebut, LKPD memperoleh opini WTP turun sebesar 14,29 %, yaitu dari 100% pada LKPD Tahun 2019 menjadi 85,71% pada LKPD Tahun 2023. Sementara itu, jumlah LKPD yang memperoleh opini WDP mengalami kenaikan sebesar 14,29%, yaitu dari 0% pada LKPD tahun 2019 menjadi 14,29% pada LKPD Tahun 2023.

Pemerintah Kota Tasikmalaya mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak 8-kali berturut – turut dari tahun 2016-2023 atas Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Pemeriksaan terhadap laporan keuangan bertujuan untuk memberikan opini tentang kewajaran penyajian laporan keuangan. dalam hasil temuan BPK RI

mengungkapkan adanya permasalahan pada BPKAD yaitu adanya Defisit Anggaran. Salah satunya dalam realisasi Pendapatan Daerah Kota Tasikmalaya. penurunan terjadi pada realisasi pendapatan transfer, pada tahun 2023 realisasi tersebut mengalami penurunan. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya hambatan dan kendala yang tercantum dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) audited TA 2023 yaitu:

1. Pemerintah dalam menyalurkan Dana Transfer memperhatikan kondisi penerimaan negara;
2. Penyaluran DAK Non Fisik – TPG hanya mencapai 98,07% karena memperhatikan saldo dana TPG yang berada di Rekening Kas Umum Daerah.

Dilihat dari fenomena diatas, Terdapat ketidaksesuaian antara pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diperoleh secara berurutan dengan masalah-masalah yang masih ada di internal BPKAD Kota Tasikmalaya. Hal ini menunjukkan bahwa opini WTP tidak selalu sepenuhnya mencerminkan kualitas pengelolaan dan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Walaupun Kota Tasikmalaya sudah meraih opini WTP sebanyak 8 kali berturut-turut berdasarkan atas Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Namun, pihak BPKAD perlu memeriksa kembali laporan tersebut sebelum diserahkan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Penurunan pendapatan transfer dapat menunjukkan adanya masalah dalam perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah. Jika penerapan good governance dan sistem pengendalian internal belum optimal, hal ini dapat berkontribusi pada

kurangnya akurasi dalam perencanaan anggaran, pengawasan, dan pelaporan keuangan, yang pada akhirnya mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dapat disimpulkan bahwa *good governance* dan sistem pengendalian internal memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini tercermin dalam beberapa ketentuan yaitu; Pasal 4 yang menekankan pengelolaan keuangan daerah secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab. Prinsip-prinsip ini merupakan bagian dari *good governance* yang secara langsung maupun tidak langsung memengaruhi kualitas laporan keuangan.

Untuk mencapai pengelolaan keuangan daerah yang ekonomis, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, wajib menyelenggarakan sistem pengendalian internal atas pelaksanaan kegiatan pemerintahan daerah. Sistem pengendalian internal yang efektif akan berdampak pada peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah, yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas laporan keuangan.

Meskipun BPKAD Kota Tasikmalaya telah berupaya mencapai target kinerja, namun masih terdapat Defisit Anggaran, terutama dalam realisasi Pendapatan Daerah. Hal ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan program dan kegiatan, BPKAD masih menghadapi berbagai kendala yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan keuangan.

Adapun beberapa komponen yang perlu untuk di tingkatkan agar mendukung meningkatkan kualitas laporan keuangan keuangan pemerintah daerah seperti terciptanya *good governance* dan sistem pengendalian internal pemerintah. Tata kelola yang baik adalah elemen penting dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Salah satu bentuk penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel adalah dengan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hal ini menunjukkan penghargaan kepada pemerintah atas terciptanya tata kelola keuangan negara yang baik (BPK R1 (2022)).

Perolehan opini WTP menjadi indikator bahwa pemerintah telah berhasil menerapkan tata kelola yang baik, terutama dalam hal akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), khususnya dalam pertanggungjawaban negara. Meskipun laporan dari pemerintah pusat maupun daerah telah disajikan secara wajar dan memadai untuk semua aspek materi sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), bukan berarti predikat WTP dari BPK menjamin tidak adanya penyimpangan atau menutupi anggaran. Predikat tersebut hanya berfungsi sebagai acuan untuk menilai kepatuhan dan kewajaran berdasarkan peraturan yang berlaku (Hidayah et.al, 2019).

Dalam pengelolaan keuangan Daerah, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Tasikmalaya memiliki peran utama dalam Menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. BPKAD bertanggung jawab dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan keuangan

daerah guna memastikan transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah. BPKAD memiliki Tugas utama dalam mengelola anggaran daerah, mengawasi penggunaan asset daerah, serta Menyusun laporan keuangan yang akan diaudit oleh BPK.

Sistem pengendalian internal yang kuat dan penerapan prinsip *good governance* yang baik adalah syarat penting untuk mencapai kualitas laporan keuangan yang optimal. Good governance tidak hanya berfokus pada prosedur administratif, tetapi juga menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Dengan melibatkan masyarakat, pemerintah dapat lebih memahami kebutuhan dan harapan publik, sehingga kebijakan yang diambil menjadi lebih relevan dan akuntabel (Inspektorat Daerah Kota Tasikmalaya, 2023).

Di sisi lain, sistem pengendalian internal yang efektif berfungsi sebagai jaminan atas keandalan laporan keuangan. Proses pengendalian yang baik membantu mencegah terjadinya penyimpangan dan korupsi, serta memastikan bahwa anggaran digunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini memberikan keyakinan kepada pemangku kepentingan bahwa laporan keuangan yang disajikan merupakan hasil dari pengelolaan yang baik dan bertanggung jawab.

Dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah, Inspektorat Kota Tasikmalaya berperan penting sebagai lembaga pengawas internal yang bertugas memastikan pelaksanaan tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel. Inspektorat melakukan pengawasan dan audit internal terhadap berbagai aspek pengelolaan keuangan daerah, termasuk kepatuhan terhadap

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) serta efektivitas sistem pengendalian internal. Beberapa fungsi utama Inspektorat Kota Tasikmalaya meliputi pelaksanaan audit, revidi, evaluasi, pemantauan, serta pemberian rekomendasi perbaikan kepada perangkat daerah guna meminimalisir risiko penyimpangan dan meningkatkan kualitas laporan keuangan. Selain itu, Inspektorat juga berperan dalam pencegahan tindak pidana korupsi serta mendukung reformasi birokrasi guna memperkuat transparansi dan akuntabilitas di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya. Dengan adanya pengawasan yang efektif dari Inspektorat, diharapkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dapat meningkat dan mencerminkan kondisi keuangan yang lebih akurat serta dapat dipertanggungjawabkan (Inspektorat Daerah Kota Tasikmalaya, 2023).

Namun, tantangan dalam menerapkan *good governance* dan sistem pengendalian internal cukup kompleks. Banyak faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi, seperti keterbatasan sumber daya manusia, infrastruktur yang belum memadai, serta budaya organisasi yang belum sepenuhnya mendukung prinsip akuntabilitas. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh *good governance* dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Kota Tasikmalaya.

Dengan fokus pada survei yang dilakukan di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Tasikmalaya, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan rekomendasi strategis bagi para pemangku kebijakan dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah. Melalui upaya perbaikan yang berkelanjutan dalam penerapan *good governance* dan sistem pengendalian

internal, diharapkan pemerintah daerah dapat mencapai tingkat transparansi dan akuntabilitas yang lebih tinggi, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan publik (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Tasikmalaya, 2023).

Akhirnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai pentingnya *good governance* dan sistem pengendalian internal dalam konteks laporan keuangan pemerintah daerah.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Maramis et al., (2018), Herawati & Nopianti, (2017), Agus & Dedy, (2021), Shinta et al., (2020), K. Rahman, (2021) mengungkapkan bahwa *Good Governance* berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan Menurut Hanifah & Haryanto, (2021) Zein et al., (2024) mengungkapkan bahwa *Good Governance* tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

Kuntadi et al., (2022), Mokoginta et al., (2017) Y. Rahman & Rahmawati, (2023), Yuntina & Arifin, (2022), Hamruna et al., (2022) mengungkapkan bahwa Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan Menurut (Harun, 2021) mengungkapkan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

Berdasarkan latar belakang dan inkonsistensi hasil penelitian terdahulu serta fenomena yang ada dan berkaitan dengan *Good Governance* ,dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) mengingat kedua hal tersebut merupakan faktor penting sebagai indikator kualitas sebuah laporan keuangan

pemerintah, penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian yang berjudul **“Pengaruh *Good Governance* dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota (Survei Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Tasikmalaya)”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mengidentifikasi permasalahan dalam penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana *Good Governance* , Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan kualitas laporan keuangan pada pemerintah Kota Tasikmalaya.
2. Bagaimana pengaruh *Good Governance* , Sistem Pengendalian Internal pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan secara parsial pada pemerintah Kota Tasikmalaya.
3. Bagaimana pengaruh *Good Governance* dan Sistem Pengendalian Internal pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan secara simultan pada pemerintah Kota Tasikmalaya.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui *Good Governance* , Sistem Pengendalian Internal pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan pemerintah Kota Tasikmalaya.

2. Untuk mengetahui Pengaruh *Good Governance* , Sistem Pengendalian Internal pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan secara parsial pada pemerintah Kota Tasikmalaya.
3. Untuk mengetahui Pengaruh *Good Governance* dan Sistem Pngendalian Internal pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan secara simultan pada pemerintah Kota Tasikmalaya.

1.4 Kegunaan Hasil Penelitian

Terdapat dua manfaat dari penelitian ini yaitu Kegunaan Pengembangan Ilmu dan Kegunaan Praktisi. Berikut yaitu penjelasan untuk kedua kegunaan tersebut.

1.4.1 Kegunaan Pengembangan Ilmu

Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan dan memberikan informasi baru kepada pembaca. Di samping itu, penelitian ini juga dapat digunakan sebagai rujukan bagi mereka yang memerlukan serta menambah pengetahuan tentang kualitas laporan keuangan pemerintah Kota Tasikmalaya.

1.4.2 Kegunaan Praktisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan digunakan bagi berbagai pihak yang membutuhkan. Manfaat yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagi Penulis
 - a. Untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana (S1) pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Siliwangi.

- b. Untuk menambah pengetahuan mengenai penerapan *Good Governance*, Sistem Pengendalian Internal pemerintah, terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada pemerintah kota.

2. Bagi Instansi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi tolak ukur dan masukan bagi instansi mengenai masalah yang berhubungan dengan penerapan *Good Governance*, Sistem Pengendalian Internal pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan pemerintah kota Tasikmalaya.

3. Bagi institusi Pendidikan

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai dokumen akademis dan acuan bagi kegiatan akademis mengenai pengaruh *Good Governance* , sistem pengendalian internal pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah kota.

4. Bagi pembaca dan pihak lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber informasi dan referensi bagi pihak-pihak lain. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi dalam penelitian selanjutnya mengenai pengaruh *Good Governance*, Sistem Pengendalian Internal pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah kota. Harapannya, penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan lebih baik dan mendalam.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada Pemerintah Kota Tasikmalaya dengan pengambilan data yang diperoleh dari kuesioner pegawai BPKAD (Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah) Kota Tasikmalaya.

1.5.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dimulai pada bulan Oktober sampai dengan bulan Juli 2025 seperti yang tertera pada lampiran